



RENCANA KERJA

Sekretariat Daerah Kota Batam

Tahun 2025



Tahun 2024



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

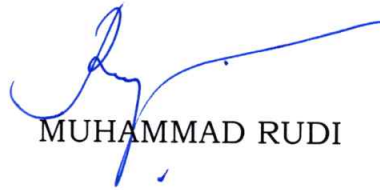
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1439

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah.

Dengan disusunnya Rencana kerja ini diharapkan dapat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dikemudian hari.

Batam, Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



H. JEFRIDIN, M.Pd

Pembina Utama Madya

Nip. 19681225 199802 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM.....5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2023..... 12

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 12

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....36

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....39

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....41

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 6061

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL61

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH623

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 9096

BAB V PENUTUP..... 13636

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM S/D TAHUN 2023 PEMERINTAH KOTA BATAM.....	14
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	36
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM.....	41
TABEL 2.4	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH <u>KOTA</u> BATAM.....	59
TABEL 3.1	ISU-ISU STRATEGIS INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL.....	61
TABEL 3.1.a	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD	70
TABEL 3.2	PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM.....	72
TABEL 3.3	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026.....	74
TABEL 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025....	98

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA.....3

GAMBAR 1.2 KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam yang tentunya harus menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam selain berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada Tupoksi Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu sesuai Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Adapun proses penyusunan Renja SKPD disusun dengan beberapa tahapan, yaitu :

- a. Persiapan penyusunan. Persiapan sebagaimana dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, rancangan awal disusun paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- c. Penyusunan rancangan. Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Hasil pembahasan

rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

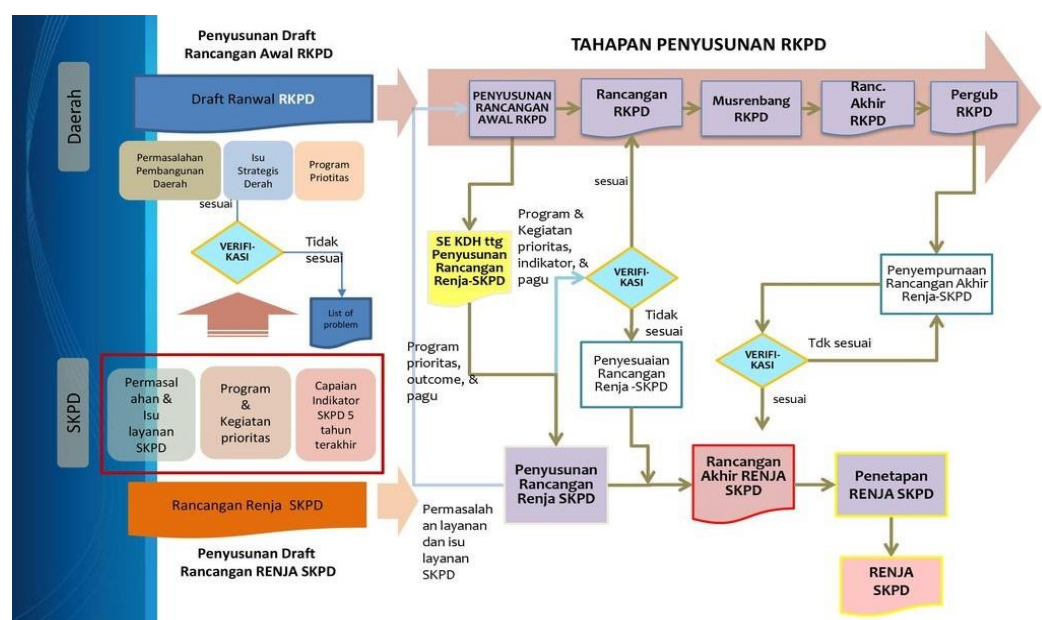
- e. Perumusan rancangan akhir. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* bahwa rencana dan target capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada dilingkungan Birokrasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan

untuk tahun 2025 berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

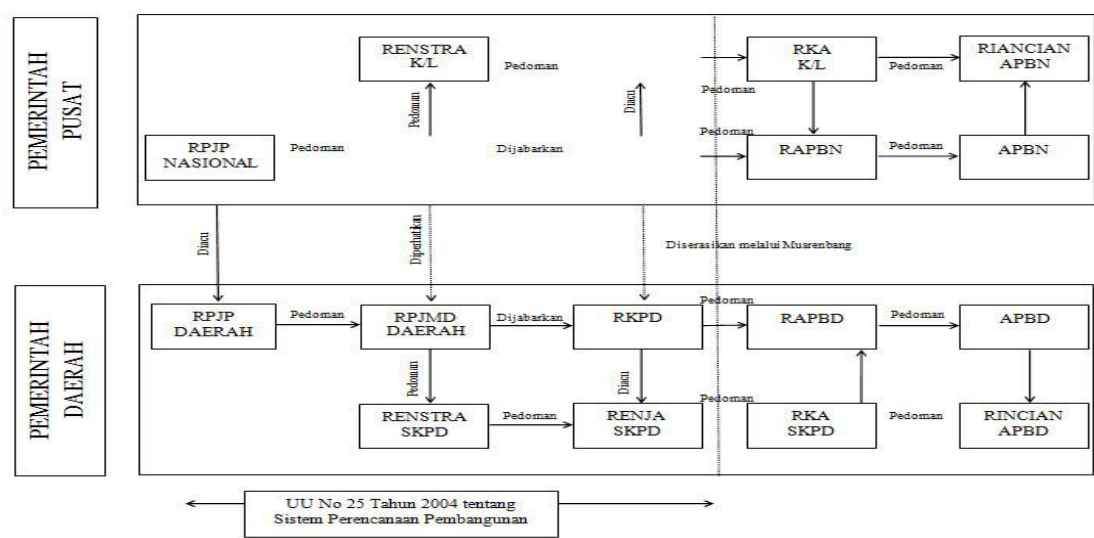
Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja (Rencana Kerja)

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 703);

10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 232 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1100);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1423)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini memuat tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang:

1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan mengenai temuan-temuan penting terhadap perbedaan awal rancangan awal RKPD; program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di dalam rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatannya cocok namun besaran target capaian yang berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

yang menguraikan tentang:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian program dan kegiatan perangkat daerah hasil cetak dari SIPD RI pada tahapan RKPD

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang:

- 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolak ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu:

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Ketiga sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2023, dituangkan melalui 3 (Tiga) Program 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Secara umum pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023, maka digambarkan capaian-

capaian kinerja tersebut. Hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Tahun 2024 Pemerintah Kota Batam

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	60-70	70-80	89.01	100%	70-80	70-80	100%	
		2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	5%	25%	20%	NA	100%	NA	15%	100%	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	92,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 orang/bulan	184 Orang	189 orang/bulan	160 orang/bulan	100%	194 Orang/bulan	194 Orang/bulan	100%	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	12 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	100%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	74,57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	74,57%	22 Orang	13 Orang	100%	22 Orang	22 Orang	100%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100%	95.74%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	NA	100%	15 Unit	15 Unit	100%	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	245 Paket	245 Paket	245 Paket	NA	100%	115 Unit	115 Unit	100%	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	160 Unit	160 Unit	72 Unit	100%	50 Unit	50 Unit	100%	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit			13 unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	120 Unit	120 Unit	126 Unit	100%	120 Unit	120 Unit	100%	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	54,68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100%	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100%	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100%	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100%	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	99,40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	6 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	7 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	95,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah PD yang memilkii PMPRB berkategori Baik									
		Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik									
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	NA	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	NA	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90	60-70	70-80	87.82	97.57%	70-80	70-80	100%	
		3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	99,14%	100%	93.33%	100%	100%	100%	100%	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	96,86%	100%	75.26%	100%	100%	100%	100%	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	222 Dokumen	100%	200 Dokumen	200 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	NA	1440 Keluarga	1003 Keluarga	100%	1440 Keluarga	1440 Keluarga	100%	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	83,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	NA	410 Dokumen	215 Dokumen	100%	410 Dokumen	410 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
	Produk Hukum Daerah										
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	100%	8 Kasus	8 Kasus	100%	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	NA	410 Dokumen	757 Dokumen	100%	410 Dokumen	410 Dokumen	100%	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU 2. Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR"	100%	100%	100%	66.66%	100%	100%	100%	100%	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	99,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Administrasi Pembangunan	100%	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	80-90	NA	92.92	92.92	100%	70-80	70-80	100%	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%	Level 4 untuk 4 Variabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	99,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	80-85	Level 4 untuk 4 variabel	70-75	92.32	100%	75-80	75-80	100%	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	400 Dokumen	400 Dokumen	214 Dokumen	100%	400 Dokumen	400 Dokumen	100%	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	450 Orang	50 Dokumen	50 Dokumen	392 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	450 Orang	500 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	99,46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024		KET
					TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	

Pada hakekatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Batam setiap tahun adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah baik dalam lingkup internal (SKPD) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-pihak terkait). Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan sesuai rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam, dapat dikemukakan gambaran pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Capaian pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berisikan kegiatan Penataan Organisasi, Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Capaian Utama dari program ini adalah terfasilitasi nya pelayanan administrasi keuangan dan kerumahtanggaan sekretariat Daerah serta tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Batam dengan tolak ukur capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui evaluasi dan *penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Dari hasil evaluasi dan penilaian, Pemerintah Kota Batam memperoleh penilaian “B” atau kategori “Baik” mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Implementasi dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta sasaran program legislasi daerah yang disusun Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam.

Selain itu, kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum merupakan media yang dapat diakses publik secara online

untuk mendapatkan referensi hukum dari produk hukum daerah berupa ringkasan, abstrak, dan katalog yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang produk hukum daerah.

Pelayanan Bantuan hukum litigasi dan non litigasi bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum atas adanya gugatan/sengketa yang melibatkan Pemerintah Kota Batam sebagai institusi yang mengeluarkan produk hukum baik bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara. Secara umum capaian output kegiatan dapat terlaksana 100%. Terkait dengan capaian kegiatan pelayanan bantuan hukum terjadi peningkatan output 100% yang disebabkan bertambahnya kasus maupun keikutsertaan Pemerintah Kota Batam pada sidang gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2023.

Kegiatan pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat merupakan implementasi dari upaya meningkatkan penghayatan dan kualitas implementasi nilai-nilai keagamaan yang diakui di Indonesia bagi masyarakat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penghayatan nilai-nilai keagamaan adalah mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman hidup masyarakat Kota Batam.

Upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan dilakukan dengan 3 (tiga) metode pelaksanaan, yaitu:

- a. pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan;
- b. Peningkatan kualitas lembaga keagamaan; dan
- c. Peningkatan kualitas pemuka agama dalam upaya menjalankan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batam.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan nilai-nilai keagamaan tercapai 100% sesuai dengan target yang ditentukan, bahkan secara kuantitatif jumlah pemuka agama yang ditingkatkan kualitasnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan data yang diverifikasi oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam rangka Pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berupa peringatan dan seremonial hari-hari besar nasional dengan sasaran meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar nasional di Kota Batam. Capaian target keluaran kegiatan tercapai 100%.

Untuk Program Perekonomian dan Pembangunan Memiliki 4 kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Dalam Pengendalian Inflasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam membentuk Tim Monitoring yang bertugas sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan merupakan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Kota Batam, sebagai Pengendali Kegiatan Pemerintah Daerah. Tim Monitoring ini melaporkan kepada Walikota Batam dalam pelaksanaan Pembangunan Kota Batam.

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Batam merupakan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara elektronik seperti layanan E-catalog Local maupun Nasional.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catat an Anali sis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LPPD		Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian		Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	89%	90%	91%	92%	89%	-	91%	92%	
3	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	70-80	70-80	80-90	80-90	70-80	-	80-90	80-90	
4	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB		Jumlah PD yang memilkii PMPRB berkategori Baik	20%	15%	10%	5%	20%	-	10%	5%	
5	Nilai SAKIP		Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan	B	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catat an Anali sis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan		Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
7	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	70-80	70-80	80-90	80-90	70-80		80-90	80-90	
8	Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti		Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
9	Persentase MoU yang ditindaklanjuti		Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10	Persentase penerapan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Batam		Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan	90%	95%	100%	100%	90%		100%	100	
11	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALIASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catat an Anali sis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	90%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
13	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan	70-80	70-80	80-90	80-90	70-80		80-90	80-90	
14	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Kinerja Pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Batam sudah tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal.

Permasalahan/tantangan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada hakekatnya tidak terlepas dari isu strategis yang menjadi permasalahan pokok Kota Batam sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya n-2 (2022). Sebagai dasar analisa pencapaian Rencana Kerja, reviu dilakukan atas Perencanaan program dan Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian-capaian target pada tahun ke-4 dari RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2021-2026.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja (Rencana Kerja) tahun 2025, beberapa Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Indeks reformasi birokrasi masih rendah. Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan

maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

2. Adanya Inflasi. Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan sistem pasar. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan hingga proses distribusi yang tidak lancar. Penyebab inflasi adalah karena kenaikan biaya produksi. Inflasi bisa disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah karena permintaan dan minat masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 Kota Batam mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang, selama periode 2016 hingga 2018, laju inflasi di Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang sebagai pembanding. Meskipun laju inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN										
	SEKRETARIAT DAERAH				246.777.037.619					281,619,448,347	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	133,288,258,685	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	138,071,897,347	
			2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	10%				2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	10%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	435,953,639	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	455,982,000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	233,355,639	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	244,315,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	202,598,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	211,667,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	42,677,367,923	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	57,657,471,296	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/Bulan	42,677,367,923	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/Bulan	57.657.471.296	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	562,450,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	459,283,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	562,450,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	459,283,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,500,750,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	19,279,089,600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4,075,202,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3,569,514,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	8,980,224,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	8,980,176,600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	729,330,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	729,330,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,715,994,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,000,069,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	5,931,867,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	7,080,871,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2,405,050,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3,734,886,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1,149,750,000	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1,116,382,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	2,377,067,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	2,229,603,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	21,500,136,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14,180,093,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,076,030,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,076,030,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	714,200,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	714,200,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11,709,906,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.389.863.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	26,541,101,223	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	25,844,608,223	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351,760,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351,760,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	17,217,203,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	16,544,710,750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8,972,137,473	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8,948,137,473	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	7,811,506,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	6,135,664,728	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	5,026,506,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4,026,664,728	

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2,785,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2,109,000,000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	4,664,773,600	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Batam	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	4,664,816,500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,648,701,200	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,648,700,700	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,016,072,400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Batam	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,016,115,800	
	Penataan Organisasi		1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	2,126,602,000	Penataan Organisasi	Batam	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	1,764,997,000	
			2.Persentase Jumlah PD yang memilkii PMPRB berkategori Baik					2.Persentase Jumlah PD yang memilkii PMPRB berkategori Baik			

			3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik					;3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	471,863,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Batam	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	418,796,000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	416,706,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	378,828,000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	131,854,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	194,332,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	886,749,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	670,194,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	219,430,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	102,847,000	

	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	535,750,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Batam	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	549,021,000	
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	333,030,000	Fasilitasi Keprotokolan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	348,315,000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	199,000,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	197,455,000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	3,720,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	3,251,000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	109,933,625,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Batam	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	139,945,120,600	
			2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90				2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90		
			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%				3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%		
			4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%			Batam	4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%		

	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	9,192,587,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Batam	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	8,803,778,000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	3,265,706,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	2,851,280,000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,129,609,500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,155,253,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,797,271,500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,797,245,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	95,002,708,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Batam	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	125,587,082,600	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	61,010,026,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	85,761,259,000	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	20,385,260,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	26,341,116,000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	12,161,208,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	12,161,189,600	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1.446.214.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1,323,518,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	1,128,680,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Batam	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	844,638,500	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	83,552,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Batam	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	166,016,500	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	988,356,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	667,285,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	56,772,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Batam	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	11,337,000	

	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	4,609,650,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Batam	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	4,709,621,500	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	4,606,550,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	4,606,550,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.550.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	101,521,500	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1.550.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1.550.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	3,555,153,934	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Batam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	3,602,430,400	
			Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	90%				Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	90%		
			Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	67.13				Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	67.13		

			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	1,063,062,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	962,565,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	121,660,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	122,160,000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	650,190,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	580,400,000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	291,212,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	260,005,000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	632,589,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Batam	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	577,510,000	

	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	237,680,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	194,073,000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	223,685,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	182,642,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	171,224,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	200,795,000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan	80-85	1,254,031,934	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80-85	1,754,261,400	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	21,400,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	738,423,000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	1,004,223,934	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	862,512,400	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	228,408,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	153,326,000	

	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	605,471,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Batam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	308,094,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	194,346,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	93,930,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	285,956,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	114,948,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	125,169,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	99,216,000	
--	---	--	--	--------------	-------------	--	--	--	-----------	------------	--

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Batam. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 diatas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2. 4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan

informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Pada Sekretariat Daerah Kota Batam tidak ada Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari para Pemangku Kepentingan tahun anggaran 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan program strategis dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini disamping berpedoman pada program strategis dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Batam Tahun 2025, juga memperhatikan berbagai program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang isu-isu strategis dilihat dari sisi isu internasional, Nasional, lokal, dan janji politik Walikota-Wakil Walikota Batam.

Tabel 3. 1
Isu-Isu Strategis Internasional, Nasional dan Lokal

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	• Respon dalam mengadaptasi protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang muncul; • Sensitivitas atas perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi masyarakat • Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas pembangunan • Peningkatan infrastruktur dalam meningkatkan ketahanan terhadap wabah global
	Nasional		
	Daerah		
2.	Daerah	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	• Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Pengentasan kemiskinan • Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja • Memanfaatkan bonus demografi

3.	Nasional	Reformasi Birokrasi	• Menguatkan komitmen pimpinan dalam menggerakkan <i>ownership</i> pegawai terhadap organisasi; • Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja; • Pilihlah program dan kegiatan yang bersifat problem solving; • Peningkatan kualitas manajemen reformasi birokrasi (<i>plan, do, act, check</i>)
	Daerah		
4.	Nasional	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Pengembangan wilayah hinterland • Pengembangan sentra industri dan usaha kecil yang terintegrasi dengan rantai pasok industri • Pemerataan infrastruktur dasar
5.	Daerah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• infrastruktur perhubungan dan transportasi • Peningkatan sistem transportasi Perkotaan • Energi dan listrik yang berkelanjutan • Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi • Akses air bersih
6.	Internasional	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau • Kelembagaan dan infrastruktur Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Iklim • Penanganan Limbah dan Persampahan
	Nasional		
	Daerah		
7.	Daerah	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	• Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai • Optimalisasi penataan ruang • Pengembangan jaringan kerja sama dengan bandar-bandar lain di negara lain • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan
8.	Nasional	Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	• Koordinasi Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam • Pengembangan Teknologi Informasi • Sinergi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan IKM sebagai pendukung rantai pasok industri
	Daerah		

9.	Nasional	Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	• Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program pembangunan gender, pemberdayaan difabel dan kelompok rentan • Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pembangunan • Pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, kelompok difabel dan rentan; • Pemberian hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi pada kelompok difabel, serta memberi insentif bagi pemberi kerja pada kelompok difabel
	Daerah		
10.	Daerah	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	•Mengupayakan peluang pembiayaan melalui KPBU, PHLN, skema Obligasi, pinjaman melalui BPD/ PT.SMI dan optimalisasi peran CSR disesuaikan dengan kebutuhan rill masyarakat

Nasional yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Sekretariat Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka perlu pula di telaah kembali lebih detail terkait isu nasionl tentang arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Batam.

Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 bahwa pemerintah memprioritaskan 4 kegiatan terkait program prioritas Reformasi Birokrasi, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akunabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta di dasarkan pada isu-isu strategis. Dengan begitu Sekretrariat Daerah Kota Batam bisa membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai

dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai, melalui program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan). Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu

Tabel 3.1.a
Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N O	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai LPPD			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	82%	88.31%	89%	90%	91%	92%
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah daerah di lingkungan pemerintah kota Batam	Nilai SAKIP / Hasil LKJIP	B	B	B	BB	BB	BB

				Persentase Ketidaksesuaian PMPRB dengan Indeks RB	30%	25%	20%	15%	10%	5%
		Indeks Kepuasan Masyarakat			82	88.31	89	90	91	92
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase penerapan SOP di lingkungan pemerintah Kota Batam	80%	85%	90%	95%	100%	100%

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Walikota Batam yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ini penjabaran sasaran kegiatan prioritas mengacu kepada Isu Isu Strategis Perangkat Daerah 2025.

Tabel 3. 2

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Tingginya Laju Inflasi	Meningkatnya harga pada kelompok barang penyumbang inflasi terutama dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.	Masih belum optimalnya pengelolaan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif dalam mengendalikan harga.
2.	Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah	Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas.	Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: Hasil analisis

Adanya Inflasi. Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan sistem pasar. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan hingga proses distribusi yang tidak lancar. Penyebab inflasi adalah karena kenaikan biaya produksi. Inflasi bisa disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah

karena permintaan dan minat masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 Kota Batam mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang, selama periode 2016 hingga 2018, laju inflasi di Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang sebagai pembanding. Meskipun laju inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

Indeks reformasi birokrasi masih rendah. Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari 3 Program Pembangunan, 19 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Jumlah Usulan Anggaran Rencana Kerja setda Tahun 2025 sebesar Rp. 281,619, 448,347,- sesuai dengan table berikut :

Tabel 3. 3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025, Perkiraan Maju Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				281,619,448,347				256,529,602,104
SEKRETARIAT DAERAH				281,619,448,347				256,529,602,104

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah 2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Batam	80-90 10%	138,071,897,347			80-90 10%	159,695,555,036
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	100%	455,982,000			100%	577,766,465
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Batam	1 Dokumen	244,315,000			1 Dokumen	159,804,920
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Batam	1 Laporan	211,667,000			1 Laporan	417,961,545

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Batam	100%	57,657,471,296			100%	53,448,407,342
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	213 Orang /Bulan	57.657.471.296		184 Orang /Bulan	213 Orang /Bulan	53,448,407,342
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Batam	100%	459,283,000			100%	1,387,039,944
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Batam	50 Orang	459,283,000			50 Orang	1,387,039,944

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
	Peraturan Perundang-Undangan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100%	19,279,089,600			100%	20,482,958,754
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	7 Paket	3,569,514,000			7 Paket	2,424,394,093
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	7 Paket	8,980,176,600			9 Paket	4,371,568,047
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	3 Paket	729,330,000			1 Paket	812,851,363

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	6,000,069,000			12 Laporan	12,874,145,251
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Batam	100%	7,080,871,000			100%	9,854,811,516
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Batam	2 Unit	3,734,886,000			5 Unit	2,317,923,608
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	245 Unit	1,116,382,000			245 Unit	1,608,558,096
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	160 Unit	2,229,603,000			160 Unit	5,928,329,812

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	100%	14,180,093,000			100%	29,675,842,248
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	9,076,030,000			12 Laporan	9,598,352,141
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	714,200,000			12 Laporan	4,548,375,600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	4.389.863.000			12 Laporan	15,529,114,507
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Batam	100%	25,844,608,223			100%	27,336,518,553

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
	Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	9 Unit	351,760,000			9 Unit	351,760,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	120 Unit	16,544,710,750			120 Unit	12,985,069,827
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	10 Unit	8,948,137,473			10 Unit	13,999,688,726

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yaang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Batam	100%	6,135,664,728			100%	6,521,577,732
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/Bulan	4,026,664,728			2 Orang/Bulan	4,098,594,949
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/Bulan	2,109,000,000			2 Orang/Bulan	2,422,982,783
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	4,664,816,500			100%	4,840,551,706

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	8 Paket	2,648,700,700			8 Paket	2,753,970,077
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	8 Paket	2,016,115,800			8 Paket	2,086,581,629
Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2. Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	Batam	100%	1,764,997,000			100%	2,837,930,600
	Jumlah Dokumen Pengelolaan	Batam	4 Dokumen	418,796,000			4 Dokumen	837,085,487

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kelembagaan dan Analis Jabatan							
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana;	Batam	3 Laporan	378,828,000			3 Laporan	676,359,626
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	44 Dokumen	194,332,000			44 Dokumen	202,688,204
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	1 Dokumen	670,194,000			1 Dokumen	818,901,084
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	1 Dokumen	102,847,000			1 Dokumen	302,896,199

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	549,021,000			100%	2,732,150,176
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan kepala/wakil kepala daerah	Batam	50 Laporan	348,315,000			50 Laporan	2,083,368,621
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	36 Laporan	197,455,000			36 Laporan	519,587,962
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	2 Laporan	3,251,000			2 Laporan	129,193,593

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Batam	100%	139,945,120,600			100%	93,793,843,491
	2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		80-90				80-90	
	3. Persentase Reomendasi kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti		100%				100%	
	4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti		100%				100%	
Adminitrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu;	Batam	100%	8,803,778,000			100%	7,849,534,123
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	Batam	12 Dokumen	2,851,280,000			12 Dokumen	3,045,701,276

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan kecamatan perbatasan.	Batam	1 Dokumen	1,155,253,000			1 Dokumen	883,285,316
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	2 Dokumen	4,797,245,000			2 Dokumen	3,920,547,531
Pelaksanaan Kebijakan Kesjahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	Batam	100%	125,587,082,600			100%	83,760,859,752
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	24 Dokumen	85,761,259,000			24 Dokumen	45,145,112,221

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial , Transmigrasi, Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Batam	200 Dokumen	26,341,116,000			200 Dokumen	20,911,972,505

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Batam	14 Dokumen	12,161,189,600			14 Dokumen	15,315,619,026
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dn kelompok masyarkat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Batam	1440 Keluarga	1,323,518,000			1440 Keluarga	2,388,156,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	Batam	100%	844,638,500			100%	618,437,540
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Batam	410 Dokumen	166,016,500			410 Dokumen	1,816,439
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	8 Kasus	667,285,000			8 Kasus	614,484,623
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Batam	410 Dokumen	11,337,000			410 Dokumen	2,136,478
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	Batam	100%	4,709,621,500			100%	1,565,012,076

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	1 Dokumen	4,606,550,000			1 Dokumen	529,141,106
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	1 Dokumen	101,521,500			1 Dokumen	932,824,092
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	1 Laporan	1.550.000			1 Laporan	103,046,878
Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	Batam	100%	3,602,430,400			100%	3,040,203,577
	2. Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan		100%				100%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
	3. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa 4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti		80-90 100%				80-90 100%	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Batam	100%	962,565,000			100%	805,894,977
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	6 Dokumen	122,160,000			6 Dokumen	221,399,130

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	4 Laporan	580,400,000			4 Laporan	539,656,674
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro Kecil;	Batam	5 Dokumen	260,005,000			5 Dokumen	44,839,173
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan;	Batam	100%	577,510,000			100%	355,872,480
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Batam	1 Dokumen	194,073,000			1 Dokumen	165,566,982
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	1 Laporan	182,642,000			1 Laporan	124,459,293

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	2 Laporan	200,795,000			2 Laporan	65,846,205
Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Batam	80-85	1,754,261,400			80-85	1,852,249,584
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	400 Dokumen	738,423,000			400 Dokumen	144,721,180
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Batam	50 Dokumen	862,512,400			50 Dokumen	1,378,032,119
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	450 Orang	153,326,000			450 Orang	329,496,285

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Batam	100%	308,094,000			100%	77,075,836
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Batam	5 Dokumen	93,930,000			5 Dokumen	24,450,423
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	Batam	5 Dokumen	114,948,000			5 Dokumen	26,438,877

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6		7	8	9
	Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Batam	5 Dokumen	99,216,000			5 Dokumen	26,186,536

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui 3 (Tiga) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Program-program diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan menjadi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - j. Penataan Organisasi
 - k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Yang dilaksanakan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

- a. Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d. Fasilitasi Kerjasama Daerah

3. Program Perekonomian Pembangunan. Program yang dilaksanakan di rumuskan menjadi beberapa kegiatan yaitu

- a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- c. Pengelolaan Barang dan Jasa
- d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					C. Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
SEKRETARIAT DAERAH								281,619,448,347,00					256,529,602,104,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								281,619,448,347,00					256,529,602,104,00
SEKRETARIAT DAERAH								281,619,448,347,00					256,529,602,104,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								138,071,897,347,00				80-90 10%	159,695,555,036,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								455,982,000,00				100%	577,766,465,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	1 Dokumen	100 %	244,315,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	159,804,920,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	1 Laporan	100 %	211,667,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	417,961,545,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								57,657,471,296,00				100%	53,448,407,342,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	215 Orang/bulan	100 %	57,657,471,296,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/bulan	53,448,407,342,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								459,283,000,00					1,387,039,944,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	41 Orang	100 %	459,283,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1,387,039,944,00

	Sekretariat Daerah	g-Undangan									Perundang-Undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah								19,279,089,600,00				100%	20,482,958,754,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	3,569,514,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2,424,394,093,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	8,980,176,600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	4,371,568,047,00

	si Umum Sekretariat Daerah												
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	3 Paket	100 %	729,330,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	812,851,363,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	12 Laporan	100 %	6,000,069,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12,874,145,251,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								7,080,871,000,00				100%	9,854,811,516,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	2 Unit	100 %	3,734,886,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2,317,923,608,00
Pengadaan Mebel													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	245 Unit	100 %	1,116,382,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	245 Unit	1,608,558,096,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	70-80 % 15 %	160 Unit	100 %	2,229,603,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	160 Unit	5,928,329,812,00

	Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Disediak an	Daerah Yang Terlaksana	Kel/De sa							Disediak an		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,180,093,000,00				100%	29,675,842,248,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	9,076,030,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	12 Laporan	9,598,352,141,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	714,200,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediak an	12 Laporan	4,548,375,600,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	4.389.863.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,529,114,507,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25,844,608,223,00				100%	27,336,518,553,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	9 Unit	100 %	351,760,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351.760.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Inde Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	15 % 70-80 %	120 Unit	100 %	16,544,710,750,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	120 Unit	12,985,069,827,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Inde Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	15 % 70-80 %	10 Unit	100 %	8,948,137,473,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi	10 Unit	13,999,688,726,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								6,135,664,728,00				100%	6,521,577,732,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													

	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bulan	100 %	4,026,664,728,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4,098,594,949,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bulan	100 %	2,109,000,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2,422,982,783,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								4,664,816,500,00					4,840,551,706,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2,648,700,700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,753,970,077,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2,016,115,800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,086,581,629,00
Penataan Organisasi									1,764,997,000,00			100%	2,837,930,600,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	4 Dokumen	100 % 100 % 100 %	418,796,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	837,085,487,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	3 Laporan	100 % 100 % 100 %	378,828,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	676,359,626,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	44 Dokumen	100 % 100 % 100 %	194,332,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	202,688,204,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	670,194,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	818,901,084,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													

	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	102,847,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	302,896,199,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								549,021,000,00				100%	2,732,150,176,00
Fasilitasi Keprotokolan													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	50 Laporan	100 %	348,315,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	2,083,368,621,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													

	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	36 Laporan	100 %	197,455,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	519,587,962,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Laporan	100 %	3,251,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	129,193,593,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								139,945,120,600,00				100% 80-90 100% 100%	93,793,843,491,00
Administrasi Tata Pemerintahan								8,803,778,000,00				100%	7,849,534,123,00
Penataan Administrasi Pemerintahan													

	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	2,851,280,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	3,045,701,276,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	1,155,253,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	883,285,316,00

	kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan												
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
	Persentase MoU yang ditindaklan juti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksan aan Otonomi Daerah	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	4,797,245,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pelaksan aan Otonomi Daerah	2 Dokumen	3,920,547,531,00

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								125,587,082,600,00					83,760,859,752,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	24 Dokumen	100 %	85,761,259,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	45,145,112,221,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													

	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	200 Dokumen	100 %	26,341,116,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	200 Dokumen	20,911,972,505,00
--	--	--	--	---	------------------------------------	-------------	-------	-------------------	------------------------------	--	-------------	-------------------

		at dan Desa, Pengenda lian Pendudu k dan KB									kat dan Desa, Pengend alian Pendudu k dan KB		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
	Persentase MoU yang ditindaklan juti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijaka n, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahte raan Masyarak at yang Meliputi Urusan Kepemud aan dan Olahraga, Pariwisat a, Pendidik an, Kebuday	Persentase Cakupan lembaga keagaman dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	14 Dokumen	100 %	12,161,189,600,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Kebijaka n, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejaht eraan Masyara kat yang Meliputi Urusan Kepemud aan dan Olahraga , Pariwisat a, Pendidik an,	14 Dokumen	15,315,619,026,00

		aan, Perpusta kaan, Kearsipa n, Trantibu m Linmas									Kebuday aan, Perpusta kaan, Kearsipa n, Trantibu m Linmas		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
	Persentase MoU yang ditindaklan juti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti	Jumlah Keluarga yang Mengikut i Peningka tan Kesadara n Keluarga dalam Membang un Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompo k Masyarak at	Persentase Cakupan lembaga keagaman dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1440 Keluarga	100 %	1,323,518,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mengikut i Peningka tan Kesadara n Keluarga dalam Memban gun Kerja Sama antar- Keluarga , Warga, dan Kelompo k Masyara kat	1440 Keluarga	2,388,156,000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								844,638,500,00				100%	618,437,540,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	166,016,500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	1,816,439,00
Fasilitasi Bantuan Hukum													
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	8 Kasus	100 %	667,285,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	614,484,623,00

	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti												
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	11,337,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	2,136,478,00

	ditindaklan juti												
Fasilitasi Kerja Sama Daerah								4,709,621,500,00				100%	1,565,012,076,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
	Persentase MoU yang ditindaklan juti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	4,606,550,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	529,141,106,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri													
	Persentase MoU yang ditindaklan	Jumlah Dokumen Hasil	Persentase Fasilitasi	- Kota Batam, Semua	100 % 70-80 %	1 Dokumen	100 %	101,521,500,00	PENDAPA TAN ASLI		Jumlah Dokume n Hasil	1 Dokumen	932,824,092,00

	juti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklan juti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kerjasama Daerah	Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 100 %				DAERAH (PAD)		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
	Persentase MoU yang ditindaklan juti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahter aan Rakyat Persentase rekomenda si kebijakan tata pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksan aan Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	1.550.000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksan aan Kerja Sama	1 Laporan	103,046,878,00

	an yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan												
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								3,602,430,400,00				100% 100% 80-90 100%	3,040,203,577,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								962,565,000,00				100%	805,894,977,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan persentase rekomendasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	6 Dokumen	100 %	122,160,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	221,399,130,00

	bidang SDA yang ditindaklan juti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa												
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
	Persentase rekomenda si kebijakan layanan perekonom ian Persentase rekomenda si layanan kebijakan administra si pembangu nan persentase rekomenda si kebijakan bidang SDA yang ditindaklan juti indeks kepuasan	Jumlah Laporan Hasil Pengenda lian dan Distribus i Perekono mian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomia n Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	4 Laporan	100 %	580,400,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengend alian dan Distribus i Perekono mian	4 Laporan	539,656,674,00

	layanan pengadaan barang jasa												
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
	Persentase rekomenda si kebijakan layanan perekonom ian Persentase rekomenda si layanan kebijakan administra si pembangu nan persentase rekomenda si kebijakan bidang SDA yang ditindaklan juti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	Jumlah Dokumen Hasil Perencan aan dan Pengawa san Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomia n Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	5 Dokumen	100 %	260,005,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Perencan aan dan Pengawa san Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	44,839,173,00

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								577,510,000,00				100%	355,872,480,00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	194,073,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	165,566,982,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
	Persentase rekomendasi layanan	Jumlah Laporan Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan	- Kota Batam, Semua	100 % 70-80 %	1 Laporan	100 %	182,642,000,00	PENDAPATAN ASLI		Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	124,459,293,00

	kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %				DAERAH (PAD)		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %	200,795,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	2 Laporan	65,846,205,00

	kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pembangunan									Pelaksanaan Pembangunan		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1,754,261,400,00				80-85	1,852,249,584,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	400 Dokumen	75-80 %	738,423,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	144,721,180,00

	nan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomenda si kebijakan bidang SDA yang ditindaklan juti												
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
	Persentase rekomenda si kebijakan layanan perekonom ian Persentase rekomenda si layanan kebijakan administra si pembangu nan indeks kepuasan layanan pengadaan barang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaa n Secara Elektroni k	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	50 Dokumen	75-80 %	862,512,400,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Layanan Pengada an Secara Elektroni k	50 Dokumen	1,378,032,119,00

	jasa persentase rekomenda si kebijakan bidang SDA yang ditindaklan juti												
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
	Persentase rekomenda si kebijakan layanan perekonom ian Persentase rekomenda si layanan kebijakan administra si pembangu nan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomenda si kebijakan bidang	Jumlah Orang yang Mengikut i Pembina an dan Advokasi Pengadaa n Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	450 Orang	75-80 %	153,326,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikut i Pembina an dan Advokasi Pengada an Barang dan Jasa	450 Orang	329,496,285,00

	SDA yang ditindaklanjuti												
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								308,094,000,00				100%	77,075,836,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
	indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	93,930,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	5 Dokumen	24,450,423,00

	si pembangu nan Persentase rekomenda si kebijakan layanan perekonom ian	gan, Perindust rian, KUKM, Penanam an Modal, Tenaga Kerja									Perdagan gan, Perindus trian, KUKM, Penanam an Modal, Tenaga Kerja		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													
	indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomenda si kebijakan bidang SDA yang ditindaklan juti Persentase rekomenda si layanan kebijakan administra si pembangu nan Persentase rekomenda si	Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Sinkronis asi, dan Evaluasi Kebijaka n Urusan Pertamba ngan dan Sumber Daya Mineral, Lingkung an Hidup, Kominfo, Perhubu ngan, Statistik, Persandi an	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	70-80 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	114,948,000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokume n Hasil Koordina si, Sinkroni sasi, dan Evaluasi Kebijaka n Urusan Pertamb angan dan Sumber Daya Mineral, Lingkung an Hidup, Kominfo, Perhubu ngan, Statistik, Persandi an	5 Dokumen	26,438,877,00

	kebijakan layanan perekonomian												
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
	indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	99,216,000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	5 Dokumen	26,186,536,00	
								281,619,448,347,00					256,529,602,104,00

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 3 (tiga) program yang telah dispesifikasi yaitu :

1. Program Penunjnng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan pelaksanaan ketiga program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Wali Kota Batam. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.
 - a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
 - b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
 - c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi .

Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Batam Tahun 2025.

- b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dan RKPD Kota Batam Tahun 2025.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 diwajibkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pada tahun 2025, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

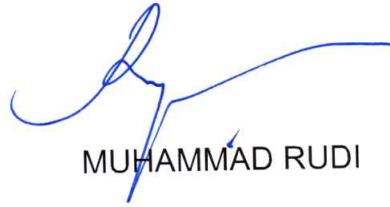
2. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa

seimbang dan berkesinambungan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI